

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj I P)**

TAHUN 2021

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MINAHASA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas penyertaan Nya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2021 yang merupakan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selang tahun anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2021 yang disusun atas dasar sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas pada Tahun 2021 diformulasikan menurut Rencana Strategis 2019 - 2023.

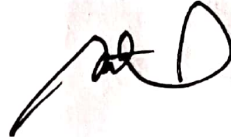
Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Tahun 2021, hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari dinas untuk mewujudkan *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999. Hasil evaluasi yang diperoleh dari laporan ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa pada Tahun Anggaran 2021 dinilai baik, hal ini dapat dilihat dari sasaran dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2021, dapat dicapai dengan baik. Meskipun kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa tahun 2021 dinilai berhasil, namun demikian masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa tahun 2021 untuk menjadi bahan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa tahun 2021 dan kiranya LKjIP Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi tentang pelaksanaan program-program bidang pekerjaan umum.

Tondano, Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa,



SILVANUS P. T. LUMINTANG, ST

Pembina Tk. I

NIP. 19680928 199903 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2021, disusun atas dasar sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pada Tahun 2021 yang diformulasikan menurut Rencana Strategis 2019-2023.

Adapun sasaran-sasaran strategis untuk mendukung upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2021 pada umumnya telah berhasil dilaksanakan.

Sasaran – sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten
2. Meningkatkan Penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten
3. Meningkatkan Kepatuhan IMB
4. Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi
5. Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW/RTR
6. Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten
7. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air
8. Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten
9. Meningkatkan Pengelolaan Drainase
10. Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak
11. Meningkatkan layanan pengolahan air limbah
12. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Tahun 2021, hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari dinas untuk mewujudkan *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999.

Hasil evaluasi yang diperoleh dari laporan ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa pada Tahun Anggaran 2021 dinilai baik, hal ini dapat dilihat dari sasaran dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2021, dapat dicapai dengan baik.

Meskipun kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa tahun 2021 dinilai berhasil, namun demikian masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang, antara lain:

- Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya Fasilitas Ruang Kantor dan perlengkapannya.
- Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia.
- Dukungan dana yang cukup, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sasaran lain yang keberhasilannya masih dapat ditingkatkan dalam pengukuran pencapaian sasaran akan terus diupayakan untuk mengoptimalkan kontribusi setiap sasaran dalam pencapaian kinerja secara keseluruhan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.2.2. Struktur Organisasi	2
1.2.3. Personil	5
1.2.4. Peralatan dan Perlengkapan	5
1.3. Permasalahan Utama	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.1.1. Visi	7
2.1.2. Misi	7
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	7
2.1.4. Strategis	13
2.2. Perencanaan Kinerja Tahunan	14
2.3. Perjanjian Kinerja	14
2.4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja	19
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	20
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2021	21
3.1.3. Perbandingan Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra	22
3.2. Analisis Capaian Kinerja	24
3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
3.4. Strategi Pemecahan Masalah	33
3.5. Realisasi Anggaran	33
BAB IV. PENUTUP.....	35

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman, penganggaran. Serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu di dalam LKjIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban menyusun LKjIP Tahun 2021 dan menyerahkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP Dinas ini berisikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Minahasa yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Minahasa. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi iorganisasi tersebut telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Minahasa terkait dengan tugas dan fungsi.

1.2.2. STRUKTUR ORGANISASI

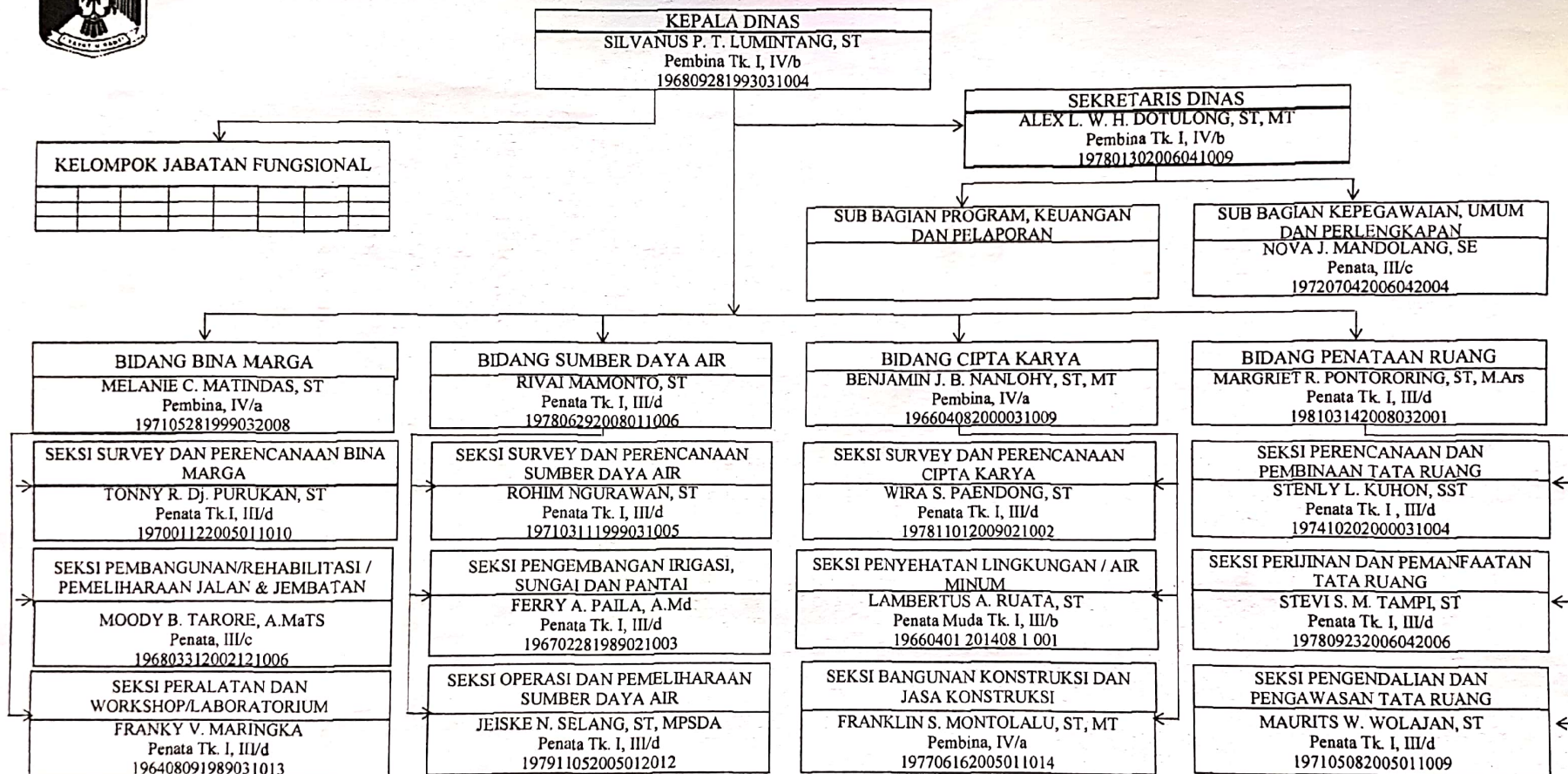
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub. Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
 - b. Sub. Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
3. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 - a. Seksi Survey dan Perencanaan Bina Marga
 - b. Seksi Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Peralatan Work Shop / Laboratorium
4. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - a. Seksi Bangunan Konstruksi dan Jasa Konstruksi
 - b. Seksi Survey dan Perencanaan Cipta Karya
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan/Air Minum

5. Bidang Pengembangan Sumber daya Air
 - a. Seksi Pengembangan Irigasi, Sungai dan Pantai
 - b. Seksi Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
6. Bidang Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Seksi Perijinan dan Pemanfaatan Tata Ruang
 - b. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang



ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA





Pemerintah Kabupaten Minahasa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.2.3. PERSONIL

Untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan 66 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

1. Klasifikasi menurut Golongan :

- Golongan IV : 5 orang
- Golongan III : 60 orang
- Golongan II : 1 orang

2. Klasifikasi menurut Pendidikan :

- SD : -
- SLTA : 5 orang
- Sarjana Muda : 4 orang
- Sarjana : 52 orang
- Pasca Sarjana (S2) : 5 orang

3. Jabatan Struktural :

- Eselon IIb : 1 Orang
- Eselon IIIa : 1 Orang
- Eselon IIIb : 4 Orang
- Eselon IV : 13 Orang

1.2.4. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Di samping jumlah dan kualitas personil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung sejumlah peralatan dan perlengkapan kerja berupa:

- Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum : 1 Unit
- Gedung Workshop : 1 unit
- Kendaraan Roda 4 (empat) : 2 Unit
- Tronton : 1 Unit
- Excavator Mini : 1 Unit
- Excavator Besar : 2 Unit
- Peralatan Kantor



Pemerintah Kabupaten Minahasa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama dihadapi di tahun 2021 adalah adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan alokasi anggaran untuk kegiatan fisik proyek berkurang dalam 2 tahun terakhir (Tahun 2020 dan 2021), dan Sebagian anggaran tahun 2021 dialokasikan untuk membayar hutang akibat refocusing anggaran pada Tahun 2020. Hal ini berdampak pada capaian Kinerja tahun 2021 belum sesuai dengan yang diharapkan / ditargetkan. Selain itu masalah yang masih sering dihadapi adalah masalah sosial di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga dibutuhkan pendekatan yang baik. Di samping permasalahan di atas, yang tidak bisa dihindari dan memang harus diantisipasi adalah masalah cuaca yang kadang tak bisa diprediksi sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Visi

Visi Dinas PUPR Kabupaten Minahasa sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”.

2.1.2. Misi

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa adalah:

“Mewujudkan pengembangan kewilayaan dengan perinsip Pembangunan berkelanjutan“

dan

“Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diuraikan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Dinas menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu

1. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten
 - b. Meningkatkan Penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten
 - c. Meningkatkan Kepatuhan IMB
 - d. Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW/RTR
3. Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten



**Pemerintah Kabupaten Minahasa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Persampahan dan Drainase, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - b. Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten
 - c. Meningkatkan Pengelolaan Drainase
5. Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak
 - b. Meningkatkan layanan pengolahan air limbah
6. Meningkatkan Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan dan Kinerja, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Pengeloaalan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder



Pemerintah Kabupaten Minahasa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI
3	4	5
1. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	1. Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Melaksanakan Pengembangan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten
	2. Meningkatkan Penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Melaksanakan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten
	3. Meningkatkan Kepatuhan IMB	Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
	4. Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Melaksanakan Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW/RTR	Melaksanakan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang
3. Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Melaksanakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Persampahan dan Drainase	1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air
	2. Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
	3. Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	1. Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	2. Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Meningkatkan Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan dan Kinerja	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder	Melaksanakan Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan dan Kinerja
		Melaksanakan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dan stakeholder



Pemerintah Kabupaten Minahasa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	MISI	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi akhir
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
1	Misi 3: Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	61,3%	65,16%	69,42%	70,1%	70,5%	72%	72%
		Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	68,8%	68,8%	75%	68%	75%	81,3%	81,3%
		Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	6,20%	6,20%	11,32%	15,10%	20,33%	25,95%	25,95%
		Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	82.5%	87,2%	90,5%	93,8%	96,75%	100%	100%
		Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,85	0,858	0,886	0,873	0,881	0,889	0,889
		Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	69%	71,05%	73%	74%	77%	80%	80%



Pemerintah Kabupaten Minahasa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	N/a	N/a	N/a	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Persampahan	Prosentase tersedianya Layanan Irigasi, Drainase dan Persampahan	49,41%	50,14%	51,86%	53,86%	58,11%	60,85%	60,85%
		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0363	0,0394	0,0477	0,0525	0,0525	0,0525	0,0525
		Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	7,43	7,43	10,57	10,57	20,34	24,55	24,55
		Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Persentase pengurangan genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun	54%	54%	54%	60%	62%	64%	64%
2	Misi 4: Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan	Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	61,47%	62,19%	62,80%	63,06%	64,38%	65,69%	65,69%
		Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	78,6%	81,05%	82,48%	83,66%	84,83%	85,99%	85,99%
		Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	68,3%	69,1%	69,78%	70,07%	71,53%	72,99%	72,99%



Pemerintah Kabupaten Minahasa
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3	Misi 5: Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	C	CC	B	BB	BB	A	A
		Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N/a	86,83	86,83	87,5	88,3	89,85	89,85

2.1.4. Strategi (Cara Mencapai tujuan dan sasaran)

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

1). Strategi

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, Dinas PUPR telah menetapkan Strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengembangan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten
2. Melaksanakan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten
3. Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
4. Melaksanakan Pengembangan Jasa Konstruksi
5. Melaksanakan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang
6. Melaksanakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten
7. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air
8. Melaksanakan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
9. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
10. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
11. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
12. Melaksanakan Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan dan Kinerja
13. Melaksanakan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dan stakeholder

2). Program.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi guna mencapai sasaran. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
2. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
3. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
4. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
6. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
7. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

-
8. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
 9. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 10. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 11. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

2.2. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, di dalam rencana kinerja ditetapkan pula rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana kinerja memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa telah menetapkan sasaran strategi, indikator kinerja dan target melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dibuat dengan mengacu pada Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja melalui penjabaran program dan Anggaran Tahun 2021. Adapun Sasaran Strategis yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten
2. Meningkatkan Penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten
3. Meningkatkan Kepatuhan IMB
4. Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi
5. Meningkatkan ketaatan terhadap RTRW/RTR
6. Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten
7. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air.
8. Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten
9. Meningkatkan Pengelolaan Drainase
10. Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak
11. Meningkatkan layanan pengolahan air limbah

12. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki indikator kinerja yang pengukurannya berdasarkan presentase dan output kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan.

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MINAHASA

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	Tahun 2021
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%
	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	70,1%
	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	68%
	Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	15,10%
	Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	93,8%
	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,873
	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%
	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	74%
	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	100%
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Persampahan	Prosentase tersedianya Layanan Irigasi, Drainase dan Persampahan	53,86%
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0525
	Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	10,57
	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Persentase pengurangan genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun	60%
2	Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	63,06%
	Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	83,66%
	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air	70,07%

		limbah domestik	
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,50%

2.4. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2021

Struktur anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.407.000.000,00 belanja tidak langsung Rp. 5.779.448.986,00 dan belanja langsung Rp. 56.925.850.618,00

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) IKU spesifik dan jelas (Specific)
- 2) IKU dapat diukur secara objektif (Measurabel)
- 3) IKU dapat dicapai (Achievable)
- 4) IKU untuk kurun waktu tertentu (Time Bound)
- 5) IKU dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable)

Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, juga dapat dilihat sebagai suatu system lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan.

Selanjutnya pada akhir tahun 2021, target kinerja (*performance plan*) akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*).

Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Area Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa pada tahun anggaran 2021. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai makna sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran

Urutan	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Penilaian Realisasi Kinerja
I	> 90,01%	Sangat tinggi
II	75,01% - 90,00%	Tinggi
III	65,01% - 75,00%	Sedang
IV	50,01% - 65,00%	Rendah
V	≤ 50,00%	Sangat rendah

3.1 CAPAIAN KINERJA

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021, secara umum telah berhasil mencapai sasaran strategis yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2021, sampai dengan akhir bulan Desember 2021 telah selesai.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana

tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2021.

Dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 sesuai anggaran yang tersedia, pencapaian target masing-masing indikator kinerja masukan (*inputs*) umumnya mencapai 100%. Keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) pada umumnya mencapai 100% dari rencana tingkat capaian kegiatan. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 496.210.000,00 dari Target sebesar Rp. 1.407.000.000,00 atau mencapai 35,27 %.

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2021		CAPAIAN	KET.
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%	100%	100%	
	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	70,1%	70,22%	100,17%	
	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	68,8%	65%	94,47%	
	Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	15,10%	14,9%	98,67%	
	Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	93,8%	91,50%	97,54%	
	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,873	0,871	99,77%	
	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	
	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	74%	74%	100%	
	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	100%	100%	100%	
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Persampahan	Prosentase tersedianya Layanan Irigasi, Drainase dan Persampahan	53,86%	52,19%	96,89%	

	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0525	0,053	100,95%	
	Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	10,57%	10,57%	100%	Tidak Meningkat karena Tidak tersedia anggaran
	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Persentase pengurangan genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun	60%	54%	90%	
2	Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	63,06%	64,26%	101,9%	
	Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	83,66%	83,94%	100,33%	
	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	70,07%	70,06%	99,98%	
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	-	Belum ada hasil penilaian	
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,50%	88,30%	101%	

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dengan Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 3.3 :

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja		Target 2021
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	3	4	6	8	10
I	Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%	100%	100%
	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	65,16%	69,42%	70,1%
	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	68,8%	75%	68%
	Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang	6,20%	11,32%	15,10%

		mendapatkan penanganan			
	Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	87,2%	90,5%	93,8%
	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,858	0,886	0,873
	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%
	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	71,05%	73%	74%
	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Persentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	N/a	N/a	100%
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Persampahan	Prosentase tersedianya Layanan Irigasi, Drainase dan Persampahan	50,14%	51,86%	53,86%
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0394	0,0477	0,0525
	Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	7,43	10,57	10,57
	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Persentase pengurangan genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun	54%	54%	60%
2	Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	62,19%	62,80%	63,06%
	Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	81,05%	82,48%	83,66%
	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	69,1%	69,78%	70,07%
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	B	BB
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,83	86,83	87,50

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra sebagaimana pada Tabel 3.4 :

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI sd. Tahun 2021	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan	Persentase pusat-pusat kawasan yang terhubung transportasi	100%	100%	100%
Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	72%	70,22%	97,53%
Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase kawasan strategis kabupaten yang mendapatkan penanganan	81,3%	65%	79,95
Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	25,95%	14,90%	57,42%
Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	100%	91,50%	91,50%
Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,889	0,871	97,98%
Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%
Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	80%	74%	92,50%
Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	100%	100%	100%
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Persampahan	Prosentase tersedianya Layanan Irigasi, Drainase dan Persampahan	60,85%	52,19%	85,77%
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0525	0,053	100,9%
Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	24,55	10,57	43,05%
Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Persentase pengurangan genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun	64%	54%	84,37%
Meningkatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Prosentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak	65,69%	64,26%	97,82%
Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	85,99%	83,94%	97,62%

	perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.			
Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	72,99%	70,06%	95,99%
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A	-	Belum ada hasil
Meningkatkan Pengeloalaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,85	88,30	98,27%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2021 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur capaian target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 dan Penetapan Kinerja 2021, juga dengan melakukan analisis-analisis terhadap target-target dari Indikator kinerja utama.

1. Bidang Bina Marga

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indikator Capaian Kepala Bidang Bina Marga						
1	Meningkatkan Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	17,21 km	2,12 km	16,7 km	787,74 %	Sangat tinggi
2	Meningkatkan Panjang jalan dalam Kondisi Baik	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	52,87%	53,4%	59,81%	112%	Sangat tinggi
3	Meningkatkan Panjang jalan dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	473,68 km	477,48 km	478,3 km	100,17%	Sangat tinggi

Prosentase capaian kinerja di tahun 2021 bidang Bina Marga untuk pekerjaan utama semuanya lebih dari 100%. Di samping mendapatkan alokasi dana dari APBD induk, juga mendapatkan alokasi dana dari APBD Perubahan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sehingga menghasilkan beberapa jenis pekerjaan yang tidak termasuk dalam penetapan kinerja Tahun 2021 di antaranya pekerjaan HRS dan Jembatan. Selain kegiatan di atas, di tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa juga melakukan pemeliharaan jalan.

2. Bidang Sumber Daya Air

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indikator Capaian Kepala Bidang Sumber Daya Air							
1	Menangani pengaman pantai dan sungai	Jumlah Penanganan Pengaman pantai dan sungai	1	0	0	0	Tidak tersedia anggaran
2	Meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	89 %	91 %	92%	101,10%	Sangat tinggi

Indikator utama kegiatan Sumber Daya Air Tahun 2021 adalah Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada. Prosentase capaian untuk Tahun 2021 melebihi target yaitu 101,10 %. Peningkatan capaian output ini salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan dimensi saluran itu sendiri. Perubahan dimensi saluran yang berdampak pada perubahan panjang saluran ini juga mempengaruhi outcome. Artinya target outcome juga capaiannya terlampaui. Untuk penanganan pengaman pantai dan sungai tahun 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga tidak ada capaian. Jadi secara umum, capaian kinerja kegiatan Bidang Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2021 melampaui target terutama untuk Kegiatan yang teranggarkan.

3. Bidang Cipta Karya.

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indikator Capaian Kepala Bidang Cipta karya							
1	Memenuhi dokumen RISPAM	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	Sangat tinggi
2	Meningkatkan Luas Wilayah yang terlayani Sistem Pengelolaan Persampahan	Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	10,57 %	10,57 %	10,57 %	100%	Sangat tinggi
3	Meningkatkan Pelayanan Air Limbah	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	505 Rmh	350 Rmh	250 Rmh	71,43%	sedang
4	Meningkatkan Panjang drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kondisi baik	Panjang Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten dalam Kondisi baik	490 m	550 m	550 m	100%	Sangat tinggi

5	Meningkatkan Panjang drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik	Prosentase Panjang Drainase Primer dan Sekunder dalam Kondisi baik	52,15%	53,25%	52,15 %	97,93%	Sangat tinggi
6	Meningkatkan Luas Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	Luas Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	29 m2	582 m2	4.500 m2	773,15%	Sangat tinggi
7	Meningkatkan jumlah bangunan yang ber-IMB	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting	395 Dok	1.000 Dok	689 Dok	68,9%	sedang
8	Meningkatkan luas bangunan dan lingkungan yang tertangani	Luas Penataan bangunan dan Lingkungan yang tertangani	1.125 m2	0	0	0	Tidak tersedia anggaran
9	Menyediakan data informasi kecelakaan konstruksi	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	Sangat tinggi
10	Meningkatkan prosentasi IMB yang diterbitkan	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	7,10%	7,84%	7,62%	97,19%	Sangat tinggi
11	Meningkatkan rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	28,96%	31,89%	31,76%	99,59%	Sangat tinggi
12	Menyediakan informasi mengenai rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dan Rencana Teknis Kawasan yang ditetapkan dengan Perbup/SK Bupati	Tersedianya informasi mengenai rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dan Rencana Teknis Kawasan yang ditetapkan dengan Perbup/SK Bupati	0	0	0	0	Tidak tersedia anggaran

Tingkat Capaian kinerja Bidang Cipta Karya di tahun 2021 untuk Kegiatan yang tersedia pada umumnya tingkat Sedang sampai Sangat Tinggi. Tingkat capaian tersebut diantaranya pelayanan air limbah mencapai 71,43% (tingkat sedang) dan Proentase IMB yang diterbitkan (Sangat Tinggi).

4. Bidang Penataan Ruang

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indikator Capaian Kepala Bidang Penataan Ruang							
1	Menyusun Dokumen persetujuan substansi evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen persetujuan substansi evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	0	0	
2	Menyusun dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 Dok	0 Dok	0	0	
3	Menerbitkan rekomendasi kesesuaian tata ruang	Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan	40 Dok	40 Dok	11 Dok	27,50%	Sangat rendah

4	Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	15 Lok	15 Lok	18 Dok	120 %	Sangat tinggi
5	Menyediakan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten yang diperdakan	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten yang diperdakan	0	1 Dok	0	0	
6	Menyediakan informasi mengenai rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan strategis Kabupaten yang diperdakan	Tersedianya informasi mengenai rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan strategis Kabupaten yang diperdakan	0	1 Dok	0	0	

Untuk bidang Tata Ruang, di tahun 2021 capaian jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang adalah 120% (sangat tinggi). Sedangkan untuk target lainnya belum terlaksana karena tahapan dokumen RTRW dan RDTR masih dalam Proses Persetujuan Substansi di Kementerian ATR/BPN.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir yaitu 2013, 2014 dan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa terus mengalami peningkatan. Ini terlihat dari semakin mantapnya keadaan jalan, semakin tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat, semakin terpenuhinya kebutuhan air bersih serta sanitasi bagi penduduk, dan terbangunnya serta terpeliharanya sarana dan prasarana pemerintahan.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa secara umum Kinerja Dinas Tahun 2021 dinilai berhasil. Walaupun kegiatan yang direncanakan dinilai berhasil dilaksanakan dengan baik, namun masih dijumpai beberapa masalah yang timbul baik masalah internal maupun eksternal, yaitu sebagai berikut :

- a. Beberapa bidang belum mendapatkan alokasi dana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Masih terdapat beberapa Program yang belum didanai atau dana belum cukup.
- b. Masih kurang memadainya sarana penunjang operasional.
- c. Sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan, teknis/fungsional sesuai kebutuhan.
- d. Belum maksimalnya system penyajian data.

3.3. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini ditinjau dari dua aspek yaitu personil dan anggaran. Dari segi jumlah personil, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa ada sebanyak 66 orang ASN. Berdasarkan hasil Analisa Beban Kerja (ABK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2021, dari kebutuhan pegawai sebanyak 81 ASN, baru terpenuhi sebanyak 66 ASN sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 15 ASN. Hal tersebut menjadi kendala dalam menyelesaikan

program kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ditambah lagi dengan adanya Pandemi, sehingga ASN harus bekerja dari rumah dengan jadwal WFH dan WFO yang diatur. Hal ini menyebabkan berkurangnya koordinasi dalam penyelesaian tugas-tugas yang ada.

Selain itu dari sisi tingkat keahlian, masih banyak ASN yang belum mengikuti pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Namun demikian, dari jumlah sumber daya yang ada, kita optimalkan sepenuhnya demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan operasional dan teknis akan terus dikembangkan melalui jalur Pendidikan/pelatihan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa.

Tabel 3.5.

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ryang Kabupaten Minahasa Menurut Pendidikan Tahun 2021

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
SD	0
SLTP	0
SLTA	5
D1	0
D2	0
D3	4
D4 / S1	52
S2	5
JUMLAH	66

Sedangkan ditinjau dari segi anggaran, pada tahun 2021 ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa mendapatkan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 56.925.850.618,00. Dari anggaran yang ada, dioptimalkan untuk pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi pengoptimalan anggaran ini antara lain dengan Bpemanfaatan kembali sisa pagu anggaran kedalam kegiatan yang mendukung pencapaian indicator kinerja.

Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE ANGGARAN (%)
1.	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	41.809.308.399	66,68
2.	Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	99.930.786	0,16
3.	Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	40.409.600	0,06
4.	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	49.921.875	0,08
5.	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	13.490.265	0,02
6.	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	380.683.823	0,61
7.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	3.095.361.000	4,94
8.	Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Tidak dianggarkan	-
9.	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Persentase pengurangan genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun	414.535.000	0,66
10.	Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	7.225.549.764	11,52
11.	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.173.219.200	3,47
12.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	7.402.889.892	11,81

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	% PENYERAPAN
1	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	70,10%	70,22%	100,17	41,809,308,399	41,809,308,399	100.00%
2	Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	15,10%	14,90%	98,67%	99,930,786	99,500,000	99.57%
3	Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	93,80%	91,50%	97,54%	40,409,600	40,409,600	100.00%
4	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	0,873	0,871	99,77	49,921,875	21,300,000	42.67%
5	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100,00	13,490,265	13,490,265	100.00%
6	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	100%	100%	100,00	39,992,768	39,690,768	99.24%
7	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,0525	0,053	100,95	3,095,361,000	3,006,005,683	97.11%
8	Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	10,57%	10,57%	100,00	0	0	Tidak dianggarkan

9	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Persentase pengurangan genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun	60%	54%	90,00	414,535,000	414,535,000	100.00%
10	Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	83,66%	83,94%	100,33	7,225,549,764	6,951,053,406	96.20%
11	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	70,07%	70,06%	99,99	2,173,219,200	2,127,220,700	97.88%
12	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,50%	88,30%	101	7,402,889,892	7,224,637,111	97,59%

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
1	Meningkatkan Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	100,17	100.00%	0,17%
2	Meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Luas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten yang mendapatkan penanganan	98,67%	99,57%	
3	Meningkatkan penanganan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani	97,54%	100%	
4	Meningkatkan Kepatuhan IMB	Rasio Kepatuhan IMB	99,77	42.67%	57,1%
5	Menekan terjadinya kecelakaan konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00	100.00%	-
6	Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang	Prosentase Kesesuaian terhadap Dokumen Ijin Lokasi / KKPR	100,00	99.24%	0,76%
7	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	97.11%	2,89%
8	Meningkatkan layanan persampahan di Kawasan Strategis Kabupaten	Prosentase Luas Wilayah yang terlayani oleh Sistem dan Pengelolaan Persampahan	100,00	0	Tidak dianggarkan
9	Meningkatkan Pengelolaan Drainase	Persentase pengurangan genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun	90,00	100.00%	
10	Meningkatkan akses terhadap air minum yang Layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota.	100,33	96.20%	4,13
11	Meningkatkan layanan pengolahan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,99	97.88%	2,11
12	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja, serta Pelayanan Kepada Stakeholder	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	101	97,59	3,41

3.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 dan seterusnya, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan alokasi dana yang cukup pada setiap bidang sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal.
- b. Mengupayakan pengadaan sarana penunjang kegiatan termasuk dana operasional kegiatan untuk meningkatkan kinerja setiap bidang.
- c. Meningkatkan kapasitas keahlian teknis/fungsional aparatur, melalui pendidikan formal maupun non formal.
- d. Untuk penanganan secara komprehensif yang berkelanjutan perlu adanya dukungan dana untuk survey, investigasi dan desain.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 sebesar Rp. 62.705.299.604,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 61.459.033.783,00 atau 98,01% dari anggaran yang ditetapkan. Akuntabilitas keuangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Fisik- Bidang Air Minum - Penugasan	6,605,550,017	6,368,085,109	96.41%
2	DAK Fisik - Bidang Irigasi	3,035,361,000	2,946,236,000	97.06%
3	DAK Fisik - Bidang Sanitasi	1,761,665,000	1,759,765,000	99.89%
4	DAK Fisik - Bidang Jalan	9,579,800,000	9,458,325,000	99.89%
5	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	29,905,243,899	29,521,409,193	98.72%
6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	159,930,786	159,269,683	99.59%
7	PAD	599,999,797	572,000,409	95.33%
8	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi ;	9,000,000,000	8,679,256,000	96.44%
9	DID	2,057,749,105	1,994,687,389	96.94%
	JUMLAH	62,705,299,604	61,459,033,783	98.01%

Selanjutnya realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,318,213,721	7,402,889,892	7,224,637,111
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3,202,523,262	3,095,361,000	3,006,005,683
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6,708,694,073	7,225,549,764	6,951,053,406
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,967,317,700	2,173,219,200	2,127,220,700
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	414,535,000	414,535,000	414,535,000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	199,930,681	99,930,786	99,500,000
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	224,895,556	49,921,875	21,300,000
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	40,409,600	40,409,600	40,409,600
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	30,531,914,338	41,809,308,399	41,344,836,291
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	26,980,500	13,490,265	13,490,265
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	351,037,422	380,683,823	216,045,727
	JUMLAH	51,986,451,853	62,705,299,604	61,459,033,783

BAB 4

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa telah berupaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2021 yang merupakan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja yang direncanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian indikator sasaran terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dikategorikan berhasil, walaupun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam peningkatan kinerja di tahun berikut.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tahun 2021 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.